

## ANALISIS PENGARUH INKLUSIFITAS KEUANGAN SYARIAH, PENDIDIKAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN (2019-2023)

Putri Diyan Safitri<sup>1</sup>; Edi Susilo<sup>2</sup>

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : putridiyan573@gmail.com<sup>1</sup>; edisusilo@unisnu.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks. Upaya pengentasannya memerlukan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah, pendidikan, dan ketimpangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi periode tahun 2019-2023 dan dianalisis dengan model regresi data panel *random effect (REM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah dan pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah dan pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang meningkatkan akses terhadap layanan keuangan syariah dan pendidikan perlu diupayakan. Di sisi lain, upaya pengentasan kemiskinan perlu diiringi dengan strategi untuk mengurangi ketimpangan.

Katakunci : Inklusi Keuangan Syariah; Pendidikan; Ketimpangan Pendapatan; Kemiskinan

### ABSTRACT

*Poverty levels in Indonesia remain a complex issue. The effort to level it requires a comprehensive understanding of the underlying factors. The study aims to analyze the impact of Shariah financial inclusion, education, and inequality on poverty levels in Indonesia. The study uses panel data from 33 provinces from the period 2019-2023 and is analysed with a random effect panel data regression model. Research results show that Shariah financial inclusion and education have a significant negative impact on poverty rates, while inequality has a significant positive impact. The findings suggest that the inclusion of Shariah finance and education could be a solution to poverty eradication in Indonesia. Policies that improve access to Shariah financial services and education must be pursued. On the other hand, efforts to eradicate poverty need to be accompanied by strategies to reduce inequality.*

*Keywords : Sharia Financial Inclusion; Education; Income Inequality; Poverty*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi isu global yang membebani banyak negara di seluruh dunia, yang tercermin dalam penekanan pada tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk tujuan pertama, yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk. Ini menunjukkan tekad dan keseriusan semua negara di dunia dalam upaya

mengurangi tingkat kemiskinan (Sari et al., 2019). Pembahasan tentang kemiskinan menitikberatkan pada kepemilikan pendapatan individu di bawah ambang kemiskinan yang telah ditetapkan, baik secara relatif maupun secara absolut (Prastowo, 2018). Namun pada dasarnya, Jika pendapatan seseorang tidak mencukupi guna pemenuhan kebutuhan hidup dasar misalnya pendidikan, makanan, tempat tinggal layak, serta layanan kesehatan mereka dianggap miskin (Rosana, 2019).

Grafik 1. menunjukkan fluktuasi variasi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, sesuai data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) pada bulan Maret 2023, terdapat 25,90 juta orang di Indonesia yang dianggap miskin, data ini berangsur turun dari Maret 2022 dan 2021. Meskipun terjadi penurunan berkelanjutan dalam tingkat kemiskinan, angka tersebut masih tinggi dan menunjukkan ketimpangan di antara penduduk. Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima urutan tertinggi di antara negara-negara ASEAN berdasarkan persentase penduduk miskin pada tahun 2021, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,71% dibawah Kamboja, Laos, Filipina dan Myanmar. Berdasarkan urutan peringkat tertinggi persentase kemiskinan di Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 57 negara OKI. Meskipun lebih baik dibanding beberapa negara lain, tingkat kemiskinan yang masih signifikan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Secara historis, inklusifitas keuangan syariah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Jasa keuangan formal dapat memberikan layanan keuangan yang lebih mudah dan tepat kepada penduduk miskin (Zia & Prasetyo, 2018). Melalui akses dan layanan keuangan, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara (Kusuma & Indrajaya, 2018) Serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang belum terbiasa dengan akses perbankan (unbanked) dan meningkatkan transaksi keuangan (Erlando et al., 2020).

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, ini menunjukkan adanya potensi yang luar biasa untuk memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data laporan *Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) penduduk muslim di Indonesia tahun 2023

berjumlah sekitar 240,62 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari seluruh populasi di Indonesia, Namun hanya ada sekitar 8% penduduk yang faham mengenai keuangan syariah sehingga minat Masyarakat mengakses layanan perbankan syariah juga sedikit jumlahnya. Menurut laporan Bank Indonesia BI (2023) regulator turut berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui optimalisasi peluang di sektor perbankan syariah. Negara dengan inisiatif perluasan industri keuangan syariah global seperti Rusia, Uganda, Uzbekistan, Aljazair, Malaysia, Pakistan dan Indonesia. Inklusi keuangan syariah di Indonesia masih terhalang oleh masalah aksesibilitas, pendidikan, dan peraturan. Masih rendahnya penetrasi perbankan syariah di berbagai daerah seperti daerah pedesaan yang seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan produk keuangan yang memenuhi etika, moral, dan prinsip syariah (Lestari, 2019).

Selain inklusi keuangan syariah, pendidikan juga memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan. Secara teoritis, Kualitas hidup masyarakat miskin akan meningkat dan mengurangi ketimpangan jika mereka meningkatkan pengetahuan keuangan dan pendidikan (Maulidina et al., 2023). Menurut Zaqiah et al. (2023) Siklus kemiskinan dapat diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang berakibat pada keterbatasan sumber daya manusia. Pendidikan adalah proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lainnya. Pendidikan berkualitas dan mudah diakses merupakan landasan penting bagi suatu negara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk masa depan serta dapat memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif (Adam et al., 2022). Namun, tantangan seperti kesenjangan antar wilayah dan akses terhadap pendidikan berkualitas tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut laporan statistik Pendidikan 2023 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 9,08 tahun yang artinya setara dengan kelas 3 SMP/Sederajat hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masih rendah sehingga perlu adanya upaya perbaikan.

Selain kedua komponen tersebut, ketimpangan merupakan masalah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Proses pengentasan kemiskinan dipersulit oleh berbagai bentuk ketimpangan, termasuk keterbatasan pendapatan, keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan keterbatasan geografis. Jika kesenjangan adalah bentuk kemiskinan atau menyebabkan kemiskinan semakin parah, maka hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan dianggap pragmatis (Nisa et al., 2020). Rasio Gini

digunakan untuk menghitung ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data BPS, Gini Ratio di Indonesia pada bulan Maret per tahunnya adalah 2019 (0,382), 2020 (0,381), 2021 dan 2022 (0,384), dan 2023 (**0,388**). Dimana Nilai Gini Ratio berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan penduduk. Menurut penelitian Zainudin (2022) ketimpangan berpengaruh terhadap kemiskinan. Sementara dalam temuan berbeda yang diuraikan oleh (Aini & Nugroho, 2023) menemukan bahwa di Jawa Timur, Tingkat kemiskinan tidak dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan.

Penelitian mengenai Tingkat inklusi keuangan di Indonesia terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan. Dalam penelitian Sari et al. (2019), Andrian et al. (2021), Saha & Qin (2023) mengatakan sebagian besar penurunan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh inklusi keuangan. Sedangkan dalam penelitian Inklusi Keuangan Syariah masih sedikit Dimana seperti penelitian Azwar (2017), Salam Dz (2018), Lubis & Ramadhoni (2019), Puspitasari et al. (2020), Maulidina et al. (2023), dan Darmawan et al. (2023) menyatakan bahwasannya inklusifitas keuangan syariah di Indonesia masih rendah dan belum merata karena tidak sepenuhnya kelompok masyarakat Indonesia mampu mengakses layanan keuangan formal seperti Perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan tiga indikator dimensi inklusi keuangan syariah menjadi Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS) sebagai variabel independen X1 seperti yang dicetuskan menurut (Sarma, 2012) dan (Umar, 2017).

Studi ini berbeda dari studi inklusifitas sektor keuangan sebelumnya, seperti Penelitian Holle (2020), Hanivan & Nasrudin (2019), Sari et al. (2019) dan Abimbola et al. (2018). Penelitian ini terfokus pada aspek inklusi keuangan syariah di Indonesia, berbeda dengan penelitian lain yang membahas inklusi keuangan secara umum. Cakupan penelitian ini meliputi sektor perbankan syariah di 33 provinsi, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan tinjauan penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik melakukan analisis yang menyeluruh dan terintegrasi tentang bagaimana Inklusi Keuangan Syariah, Pendidikan, dan Ketimpangan Pendapatan berkorelasi dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada pendekatan pengukuran kemiskinan

menggunakan data terbaru, yang melibatkan penggunaan indikator atau proksi berdasarkan data yang di ambil.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Tinjauan Pustaka

#### Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2021) serta Setyowati & Ediyono (2020), kemiskinan mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki cukup sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, meningkatkan pendapatan, mendapatkan akses ke layanan dan fasilitas publik, dan mencapai indeks multidimensi lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia menganggap kemiskinan sebagai penghambat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Nufus & Yazid (2023), di Indonesia ada dua jenis kemiskinan yang berbeda yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan budaya. Jenis yang pertama disebabkan oleh cara seseorang mengelola sumber daya serta kurangnya akses ke sumber daya sedangkan jenis yang ke dua adalah kecenderungan mereka untuk menyerah dan tidak berusaha mengatasi kesulitan mereka. Tingkat kemiskinan merupakan indikator statistik yang menunjukkan proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan tempat tinggal. Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah:

$$\text{Persentase Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Populasi}} \times 100\%$$

Salah satu alat penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara atau wilayah adalah persentase kemiskinan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang hidup dalam kondisi yang tidak layak.

#### Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan telah diakui oleh pemerintah, peneliti, dan pengamat di seluruh dunia sebagai upaya untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan. Ini dapat membantu mengatasi kemiskinan, meningkatkan daya beli, meningkatkan produktivitas guna mencapai tujuan pengembangan strategi keuangan yang inklusif (Bakhtiar et al., 2022), (Abimbola et al.,

2018). Inklusivitas keuangan di Indonesia didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan akses kepada berbagai jenis uang, barang, dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka (Kusuma & Indrajaya, 2018) (Akyuwen & Mangowal, 2018).

Dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016, OJK mendefinisikan Inklusi Keuangan Syariah (IKS) sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai keuangan di sektor jasa keuangan dengan memberikan akses ke berbagai macam layanan dan Produk keuangan syariah yang disesuaikan dengan situasi dan kapasitas setiap orang, dengan tujuan utama untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Bank syariah memiliki kemungkinan besar untuk memberikan kontribusi yang besar sebagai bagian dari sektor perbankan nasional pada peningkatan inklusifitas keuangan nasional melalui fitur-fitur unik yang dimilikinya (Puspitasari et al., 2020).

Prinsip perbankan syariah yang mengutamakan sistem pembagian keuntungan dan fokus pada mashlahah untuk umat yang membuat keuangan Islam tidak asing dengan konsep inklusi keuangan, karena Islam sendiri menekankan kesetaraan dan keadilan. Salah satu cara akses keuangan meningkat yaitu dengan menggabungkan instrumen berbasis syariah (Seman et al., 2019). Konsep dan kebijakan keuangan syariah yang inklusif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan memberikan masyarakat akses keuangan yang mudah, aman, dan sesuai (Lubis & Ramadhoni, 2019).

Indeks Keuangan Inklusif digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengevaluasi tingkat inklusi mereka dalam pasar keuangan (Dermawan et al., 2020). Beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukur inklusi keuangan syariah dapat digunakan untuk menilai tingkat inklusi keuangan. Menurut penelitian Sarma (2012) dan metode variabel Inklusi Keuangan Syariah yang dikembangkan Umar (2017), ada tiga indikator dalam menetapkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS), yakni Indeks Penetrasi perbankan syariah, Indeks Ketersediaan perbankan syariah, dan Indeks Penggunaan perbankan syariah.

#### 1. Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah ( $D_1$ ):

Dimensi ini merupakan aspek pertama dari inklusi keuangan syariah yang mengukur seberapa luas penggunaan layanan perbankan syariah. Semakin banyak orang yang menggunakan perbankan syariah, semakin inklusif keuangan syariah. Untuk

dimensi ini, Perhitungan rasio DPK Perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) dalam jutaan rupiah per seribu penduduk dewasa (15+) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$D_1 = \frac{\text{Jumlah DPK Perbankan Syariah (tahun}_t\text{)}}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa 15+ (tahun}_t\text{)}} \times 1.000$$

## 2. Dimensi Ketersediaan Perbankan Syariah ( $D_2$ ):

Aspek kedua dalam inklusi keuangan adalah ketersediaan, ketersediaan perbankan syariah didefinisikan sebagai ketersediaan layanan keuangan untuk individu dan kelompok bisnis. Akses yang luas terhadap layanan keuangan di suatu daerah merupakan indikator inklusi keuangan yang positif. Oleh karena itu, perbankan perlu terus menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat agar tercipta sistem keuangan yang inklusif, penyedia layanan keuangan diharuskan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Dimensi ini meninjau rasio jumlah Kantor Layanan Perbankan Syariah (UUS, BUS, BPRS) terhadap seratus ribu penduduk dewasa (15+). Perhitungan rasio ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$D_2 = \frac{\text{Jumlah Kantor Layanan Bank Syariah (tahun}_t\text{)}}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa 15+ (tahun}_t\text{)}} \times 100.000$$

## 3. Dimensi Penggunaan Perbankan Syariah ( $D_3$ ):

Dimensi ini dilihat dari jumlah pembiayaan dari perbankan syariah di Indonesia yang diberikan. Dimensi Penggunaan Syariah menunjukkan seberapa banyak manfaat yang diberikan oleh institusi keuangan syariah kepada nasabah mereka yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut. Untuk mengukur dimensi penggunaan menggunakan rasio jumlah pembiayaan (financing) perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) terhadap PDRB dengan harga konstan dalam miliaran rupiah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$D_3 = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah (tahun}_t\text{)}}{\text{Nilai PDRB (tahun}_t\text{)}} \times 1.000$$

## Pendidikan

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terorganisir dengan tujuan menciptakan suasana pembelajaran di mana peserta didik secara aktif meningkatkan kemampuan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak yang baik, dan keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan pribadi, sosial,

serta kemajuan bangsa dan negara. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan mutu dan kesempatan akses dalam pendidikan. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, menurut Suhendi & Astuti (2023), akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Zaqiah et al. (2023) menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan dan metode untuk mencegah kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk menentukan kemampuan seseorang atau negara untuk menghadapi perkembangan zaman, seperti mendapatkan pengetahuan tentang kemajuan teknologi modern dan memperoleh kemampuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat rata-rata lama sekolah merupakan parameter penting dalam menilai kualitas pendidikan, dengan durasi pendidikan yang lebih lama umumnya menunjukkan kualitas pendidikan yang lebih baik (Isroviyah, 2020). Durasi pendidikan yang lebih lama umumnya menunjukkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi, periode belajar yang lebih panjang umumnya menunjukkan mutu pendidikan yang lebih baik

### **Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Zainudin (2022) pertumbuhan ekonomi dan penurunan disparitas pendapatan antar individu, daerah, dan sektor dapat dilihat sebagai tanda bahwa pembangunan berhasil. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, pola pembangunan ekonominya diwarnai oleh keragaman karakteristik wilayah yang tak terelakkan. Oleh karena itu, wajar bahwa pola pembangunan ekonominya tidak menunjukkan keseragaman.

Kemiskinan dan kesenjangan berhubungan satu sama lain secara pragmatis, yang berarti bahwa kesenjangan adalah jenis kemiskinan atau kesenjangan mampu menyebabkan kemiskinan menjadi lebih parah (Nisa et al., 2020). Gini ratio digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan. dengan skala nilai antara nol dan satu. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin besar.

### **Hipotesis**

#### **Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Analisis Iskandar (2018), menunjukkan korelasi negatif signifikan antara inklusi keuangan syariah dan kemiskinan di Indonesia, menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan. Daerah dengan inklusi keuangan syariah yang rendah cenderung tingkat kemiskinannya lebih tinggi, sementara provinsi

yang inklusifitas keuangan syariahnya tinggi biasanya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Penelitian oleh Nabil & Herianingrum (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah, yang diukur dengan jumlah pembiayaan per PDB, memiliki korelasi dan dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat kemiskinan dari sudut pandang keuangan dan inklusi keuangan. Upaya OJK untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan yang mudah dan memberikan perlindungan finansial bagi mereka yang rentan terhadap kemiskinan akan mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat melalui percepatan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Inklusi Keuangan Syariah (IKS) memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan modal usaha, seperti pembiayaan mikro syariah (Bataineh, Saleh, n.d.) Hal ini membantu mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha, sehingga meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Mendorong masyarakat untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik melalui Produk dan layanan keuangan syariah, seperti tabungan dan deposito syariah. Hal ini membantu mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis berikut:

H<sub>1</sub>: Inklusi Keuangan Syariah Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

### **Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Hasil penelitian dari Zaqiah et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia secara negatif dan signifikan, yang berarti jika ada peningkatan pendidikan, tingkat kemiskinan menurun. Dengan cara ini, pemerintah dapat memperluas program peningkatan pendidikan di setiap wilayah.

Penelitian Adam et al. (2022) menggunakan metode regresi data panel dari 2011 hingga 2020 untuk empat kabupaten menunjukkan bahwa hasil analisis pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah berdampak pada kemiskinan secara bersamaan dan memiliki dampak negatif yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Artinya dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah dapat menjadi salah satu strategi untuk memerangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Nabibah & Hanifa (2022) juga menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur dipengaruhi secara signifikan oleh pendidikan selama periode 2018–2021.

Meningkatkan akses terhadap pendidikan adalah salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan. Dengan pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan akan meningkat. Pendidikan sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*) dimana hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

### **Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Nisa et al. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi secara signifikan oleh ketimpangan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Menurut Suparman et al. (2022) elastisitas ketimpangan selalu positif, yang berarti bahwa jika ketimpangan turun, kemiskinan akan berkurang.

Menurut (Maskur, 2023) kemiskinan antar provinsi di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh ketimpangan pendapatan selama periode 2017 sampai 2021. Dengan kata lain, tingkat ketimpangan pendapatan akan memengaruhi persentase penduduk miskin di Indonesia. Jika kesenjangan adalah bentuk kemiskinan atau menyebabkan kemiskinan semakin buruk, maka hubungan antara kemiskinan dan kesenjangan dianggap pragmatis. Ini sesuai dengan keadaan di beberapa provinsi Indonesia.

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dua isu yang saling terkait erat. Dimana Ketika terdapat ketimpangan yang tinggi hal ini dapat menyebabkan kemiskinan, karena sebagian besar pendapatan dan kekayaan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat maka hal ini akan membuat sulit bagi kelompok masyarakat lainnya untuk keluar dari kemiskinan. Studi ini akan menguji hipotesis berikut:

H<sub>3</sub>: Ketimpangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan metode kuantitatif melibatkan pengumpulan data numerik atau data kualitatif yang dikonversi menjadi data numerik

untuk analisis statistik. Penelitian asosiatif ialah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih (Priadana & Sunarsi, 2021). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan perangkat lunak *Eviews* 12. Teknik analisis ini diterapkan untuk mengukur pengaruh variabel independen, termasuk Inklusi Keuangan Syariah (X1), Pendidikan (X2), dan Ketimpangan Pendapatan (X3), terhadap variabel dependennya, yaitu Tingkat Kemiskinan (Y).

Penelitian ini memanfaatkan data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2019 hingga 2023. Metode *purposive sampling* diterapkan untuk memilih sampel dari keseluruhan provinsi di Indonesia. Kriteria pemilihan mencakup provinsi yang memiliki kelengkapan data dalam laporan statistik perbankan syariah (OJK) tahun 2019-2023, rata-rata lama sekolah, dan gini ratio (baik perkotaan maupun pedesaan) yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah 33 provinsi dipilih sebagai sampel. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dan diproses dari OJK dan BPS yang digunakan untuk menghitung nilai indeks inklusi keuangan syariah dan variabel lainnya yang dibutuhkan. Definisi operasional dapat dilihat pada Tabel 1.

### Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Mengacu pada penelitian Sarma (2012) dan pendekatan indikator oleh (Umar, 2017), Indeks Inklusi Keuangan Syariah terdiri dari 3 dimensi yaitu Penetrasi ( $D_1$ ), Ketersediaan ( $D_2$ ), Dan Penggunaan ( $D_3$ ). Untuk mengukur Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS), persamaan berikut diterapkan sebelum menentukan nilai indeks dimensi inklusi keuangan syariah:

$$d_i = w_i \frac{D_i - m_i}{M_i - m_i}$$

Deskripsi:

- $d_i$  = nilai dimensi ke-i,
- $w_i$  = bobot setiap dimensi ke-i,
- $D_i$  = nilai aktual dimensi ke-i,
- $m_i$  = nilai minimum dimensi ke-i.
- $M_i$  = nilai maksimum dimensi ke-i,

Pada tabel 2 dan 3. Berdasarkan pada penelitian (Umar, 2017) pemberian bobot untuk masing-masing dimensi 1, 2 atau 3 bernilai sama  $w = (1,1,1)$  dengan asumsi bahwa setiap dimensi memiliki prioritas penting yang sama, sehingga bobot nilai untuk seluruh  $i$  adalah  $w_i = 1$ .

Untuk menghitung nilai indeks inklusi keuangan syariah di setiap aspek, perlu ditentukan batas atas dan bawah untuk setiap indikator. Batas atas dan bawah ini harus ditetapkan sebagai nilai yang tidak berubah untuk setiap dimensi dalam penelitian ini. Nilai minimum ( $m_i$ ) untuk setiap dimensi adalah 0, sedangkan nilai maksimum ( $M_i$ ) adalah nilai terbesar dari data yang tersedia untuk setiap dimensi.

Nilai dimensi yang paling dekat dengan ( $w_i$ ) menunjukkan area yang memiliki tingkat capaian tertinggi dari seluruh dimensi  $d_1$ ,  $d_2$  dan  $d_3$ . Jika titik  $w = (1,1,1)$ , maka rumus akhir dari IKS adalah sebagai berikut:

$$IKS = \frac{1}{2} \times \left[ \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{3}} + \left( 1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + (1-d_3)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right]$$

### **Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan lainnya. Indikator yang digunakan dalam mengukur pendidikan yaitu Tingkat rata-rata lama sekolah di 33 Provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

### **Ketimpangan Pendapatan**

Variabel independen Ketimpangan Pendapatan dalam penelitian ini menggunakan Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023.

### **Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai persentase dari populasi dengan pengeluaran perkapita rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tujuan penelitian ini, data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan dalam satuan persen di 33 Provinsi di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Setelah variabel-variabel diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih model terbaik. Dalam analisis data panel, ada tiga pendekatan estimasi yang dapat digunakan: *Common effect (CEM)*, *fixed effect (FEM)*, dan *random effect (REM)*. Teknik estimasi *Ordinary Least Squared (OLS)* digunakan pada model CEM dan FEM sedangkan teknik estimasi *Generalized Least Squared (GLS)* digunakan pada model REM. Untuk melakukan estimasi, rumus regresi data panel digunakan adalah:

$$Y(\text{Kemiskinan}) = \beta_0 + \beta_1 \text{IKS}_{i,t} + \beta_2 \text{Pendidikan}_{i,t} + \beta_3 \text{Ketimpangan}_{i,t} + \text{eit}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kemiskinan)

X1 = Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS)  
X2 = Variabel Independen Pendidikan (Rata-rata lama sekolah)  
X3 = Variabel Independen Ketimpangan (Gini Ratio)  
 $\beta_0$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Variabel Independen  
e = Residual  
t = Waktu (tahun)  
i = Unit (provinsi)

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pada tabel 3. Didapatkan data perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS) yang dibentuk dari 3 nilai indeks dimensi inklusi keuangan syariah yang didasarkan pada penelitian (Umar, 2017). Berdasarkan proses perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS) di seluruh Provinsi di Indonesia pada periode tahun 2019-2023. Nilai indeks dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah ( $IIKS \leq 0,3$ ), sedang ( $0,3 < IIKS \leq 0,6$ ), dan tinggi ( $0,6 < IIKS \leq 1$ ).

Tabel 3. menunjukkan nilai rata-rata IIKS tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut: Terdapat 2 Provinsi yang dikategorikan mempunyai indeks inklusi keuangan syariah tinggi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Terdapat 1 provinsi yang berada di kategori sedang yaitu provinsi NTB dan 30 provinsi di Indonesia masih dikategorikan rendah. Adapun nilai indeks rata-rata dimensi IIKS (D1, D2, D3) secara parsial, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.

Tabel 5 menunjukkan statistik deskriptif untuk tahun yang diamati, menunjukkan nilai minimum IIKS sebesar 0,009, nilai maksimum 0,779 dan rata-rata nilai IIKS sebesar 0,141 dengan standar deviasi sebesar 0,153. Berarti rata-rata nilai IIKS yaitu 0,141 (Kategori rendah). Variabel Ketimpangan Pendapatan memiliki nilai minimum 0,236 dan nilai maksimum 0,449 sedangkan nilai rata-ratanya adalah 0,349 dengan standar deviasi sebesar 0,041. Berarti nilai rata-rata Gini Rasio adalah 0,34% (Kategori ketidakmearataan rendah). Variabel Pendidikan memiliki nilai minimum 6,85, nilai maksimum 11,42 dan nilai rerata sebesar 10,51 dengan standar deviasi sebesar 0,84. Ini berarti rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 10 Tahun. Kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 3,47, nilai maksimum 27,53 sedangkan nilai rata-ratanya adalah 10,51 dengan standar deviasi sebesar 5,38. Berarti rata-rata tingkat persentase kemiskinan yaitu sebesar 10,51%.

### Pemilihan Model Data Panel

Pada tabel 7. Hasil dari uji Chow, memiliki nilai probabilitas pada Cross-section Chi-square sebesar 0,000 yang menunjukkan kurang dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga H1 diterima dan model FEM yang dipilih, setelah model FEM terpilih maka selanjutnya dilakukan Uji Hausman. Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada cross-section chi-square sebesar 0,4884, yang berarti lebih dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak, maka model REM adalah pilihan yang tepat. Setelah itu, uji LM digunakan untuk membandingkan model REM atau CEM yang akan dipilih. Hasil uji LM yang ditunjukkan pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Both pada Breusch-Pagan sebesar 0,000, yang berarti  $< \alpha = 0,05$ , sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, model yang tepat adalah model REM. Model data panel dapat dilihat di tabel 6. Berdasarkan hasil regresi tersebut, Berikut adalah persamaan regresi yang dihasilkan:

$$\text{KEMISKINAN} = 15.3155757544 - 2.53481932561 * \text{IICS} - 0.944027584797 * \\ \text{PENDIDIKAN} + 11.951979947 * \text{KETIMPANGAN}$$

Menurut persamaan di atas, nilai konstanta atau intersep adalah 15.31557. Sesuai dengan nilai koefisien negatif, setiap kenaikan variabel Inklusi Keuangan Syariah akan mengurangi variabel kemiskinan sebesar -2.5348 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan; setiap kenaikan variabel Pendidikan akan mengurangi variabel kemiskinan sebesar -0.9440 satuan, dan setiap kenaikan variabel tingkat ketimpangan akan meningkatkan variabel kemiskinan sebesar 11.951 satuan.

#### **Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hasilnya dianggap signifikan secara statistik jika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, seperti yang terlihat pada Tabel 10, dengan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000002 yang kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dipengaruhi secara bersama-sama (simultan) oleh semua variabel independen.

#### **Koefisien Determinasi**

Dari nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,153149, dapat disimpulkan bahwa sekitar 15,31% dari variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam model ini. Sementara itu, sebagian besar

variasi variabel Y dijelaskan oleh faktor-faktor tambahan yang tidak disertakan dalam model tersebut.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Berdasarkan Tabel 6, model *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa probabilitas pada variabel IKS adalah 0,0126 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , yang menandakan bahwa  $0,0126 < 0,05$ . Oleh karena itu, H1 diterima, menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel IKS dan kemiskinan.

Demikian pula, hasil probabilitas pada variabel Pendidikan adalah 0,0005 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , dengan nilai  $0,0005 < 0,05$ , menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel Pendidikan dan kemiskinan.

Selain itu, hasil probabilitas pada variabel Ketimpangan adalah 0,0025 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , yang menunjukkan bahwa  $0,0025 < 0,05$ . Oleh karena itu, H1 juga diterima, menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel Ketimpangan dan kemiskinan.

### Diskusi

#### Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara inklusi keuangan syariah dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2019-2023. Koefisien korelasi sebesar -2,534819 dan nilai probabilitas 0,0126, yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05, menunjukkan hubungan statistik yang kuat antara kedua variabel. Temuan ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan syariah berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan adanya hubungan berbanding terbalik antara inklusi keuangan syariah dan tingkat kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan syariah sebesar 1% diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1%. Sebaliknya, penurunan inklusi keuangan syariah sebesar 1% berakibat pada peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1%. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Iskandar, 2018) (Darmawan et al., 2023)

Dengan kata lain, Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa inklusi keuangan syariah mampu berperan sebagai faktor pengurang kemiskinan. Melalui prinsip-prinsip seperti pemberdayaan ekonomi, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, penghindaran praktik eksploitasi, peningkatan akses di daerah terpencil, dan

promosi kesadaran sosial, inklusi keuangan syariah meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang berkelanjutan dan sesuai syariat Islam. Hal ini membantu memerangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat yang rentan secara ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha kecil, dan menghindarkan individu dari jebakan hutang yang tidak terkendali.

Inklusi keuangan Syariah memungkinkan masyarakat miskin untuk menabung uang mereka dengan aman dan mudah. Hal ini dapat membantu mereka untuk membangun aset dan berinvestasi di masa depan. Mampu meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang berbasis syariah dan terbebas dari Riba, Gharar dan Maysir. Inklusi keuangan syariah juga memungkinkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pinjaman untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, kesuksesan inklusi keuangan syariah tergantung pada implementasi yang efektif dan dukungan lintas sektor untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tabel 4, menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih tidak merata di beberapa provinsi di Indonesia. Ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat dan intervensi pemerintah untuk memastikan inklusi keuangan syariah merata di seluruh wilayah. Implementasi inklusi keuangan syariah di Indonesia masih terkonsentrasi di daerah dengan mayoritas Muslim seperti Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini mendorong perlunya strategi yang tepat untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah ke seluruh wilayah Indonesia

### **Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Analisis ini menemukan dampak negatif signifikan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia dalam periode 2019-2023. Dilaporkan koefisien -0,944028 dengan probabilitas 0,0005, lebih rendah dari alpha yang lazim (0,05). Hasil menunjukkan korelasi statistik yang signifikan antara pendidikan dan kemiskinan.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan korelasi terbalik antara pendidikan dan kemiskinan. Ketika pendidikan meningkat sebesar 1%, kemiskinan cenderung menurun sebesar 1%. Sebaliknya, penurunan pendidikan sebesar 1% berdampak pada peningkatan kemiskinan sebesar 1%. Penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya dari (Zaqiah et al., 2023), (Adam et al., 2022), (Wangke & Kainde, 2021), dan (Rohmah et al., 2021).

Pendidikan memainkan peran penting dalam usaha mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, pendidikan berperan krusial dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas dan memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka. Teori pertumbuhan menjelaskan bahwa peran pemerintah sangatlah vital dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui investasi di bidang penelitian dan pengembangan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas manusia

Investasi di bidang pendidikan dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian individu seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Individu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan akses ke peluang ekonomi yang menguntungkan, yang pada gilirannya meningkatkan potensi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Meskipun pendidikan memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, tantangan seperti ketimpangan akses dan biaya pendidikan yang tinggi perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

### **Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Analisis ini mengungkap dampak positif yang signifikan dari ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2019-2023. Dengan koefisien 11,95198 dan probabilitas  $0,0025 < 0,05$  di mana hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan berbanding lurus, semakin besar ketimpangan pendapatan antar penduduk mengakibatkan lebih banyak penduduk miskin di setiap provinsi di Indonesia. Sesuai dengan penelitian (Maskur, 2023).

Distribusi pendapatan adalah faktor utama dalam menentukan kemiskinan. Jika tingkat pendapatan tidak merata, ini dapat mengakibatkan beberapa kelompok penduduk memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Ketika disparitas pendapatan meningkat karena penurunan pendapatan pekerja, ini dapat mendorong orang-orang yang sebelumnya memiliki pengeluaran di atas garis kemiskinan menjadi di bawah garis kemiskinan.

Menurut Suparman et al. (2022), secara umum hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan selalu berada dalam arah yang positif, yang menyiratkan bahwa penurunan tingkat ketimpangan cenderung mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika rata-rata penghasilan per kapita bulanan seseorang ada di bawah garis kemiskinan, maka individu tersebut dikategorikan miskin.

Ketimpangan didefinisikan sebagai perbedaan antara orang dengan pendapatan tinggi dan orang dengan pendapatan rendah. Dalam beberapa keadaan, pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan per kapita, yang berakibat pada naiknya pendapatan bagi mereka yang sebelumnya tergolong miskin, tetapi hanya 20% masyarakat teratas yang merasakan sebagian besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa beberapa faktor secara bersamaan (simultan) mempengaruhi variabel dependen Tingkat Kemiskinan. variabel independen Inklusi Keuangan Syariah dan Pendidikan secara simultan berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Sedangkan, secara khusus (parsial) Ketimpangan Pendapatan di Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan selama periode 2019 hingga 2023.

Diharapkan peneliti berikutnya dapat meluaskan penelitian ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang belum dipertimbangkan dalam penelitian sebelumnya. Melalui penerapan kebijakan yang lebih khusus dan terfokus, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan cakupan dan efektivitas program keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan yang seringkali kurang terlayani, baik di kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

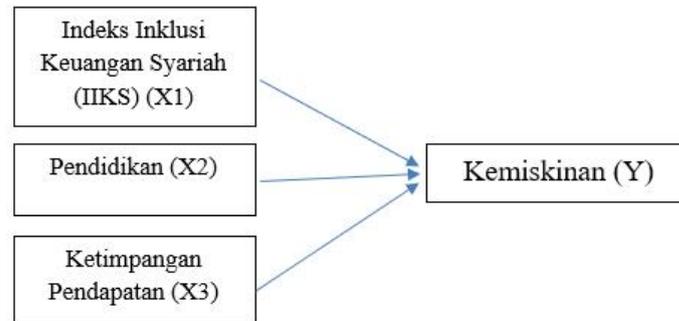
- Abimbola, A., Olokoyo, F. O., Babalola, O., & Farouk, E. 2018. Financial Inclusion as a Catalyst for Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(06), 481–490. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v6i6.em06>
- Adam, D., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. 2022. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utara-Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1). <https://doi.org/10.35906/jep.v8i1.1039>
- Aini, S. N., & Nugroho, R. yuwono Y. 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19474>

- Akyuwen, R., & Mangowal, C. 2018. Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan di Indonesia. *Modus*, 30(1), 96–109.
- Andrian, T., Herlina Sitorus, N., Febriana MK, I., & Willy Chandra, S. 2021. Financial inclusion and it's effect on poverty in Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 97–108. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.12083>
- Azwar, A. A. 2017. Analisis Empiris Inklusifitas Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i1.21>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Penghitungan Dan Analisis 2021 Kemiskinan Makro Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. In *Badan Pusat Statistik* (Issue 57, pp. 1–8). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Bakhtiar, F., Prayoga, R., & Mulya, A. 2022. Analisis literasi keuangan dan financial technology terhadap inklusi keuangan pada pelaku UMKM perempuan. *Akuntabel*, 19(2), 260–268. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11178>
- Bataineh, Saleh, A. n.d. Analysis Of Bca Syariah Financial Performance Based On Growth Rate In Indonesia. *Journal of IEB (Islamic Economics and Business) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 40–49.
- BI, B. indonesia. 2023. Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia*.
- Darmawan, A. P., Erlando, A., & Santoso, D. B. 2023. Examining an Islamic Financial Inclusivity and Its Impact on Fundamental Economic Variables in Indonesia (An Approach of Static Panel Data Analysis). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(4), 337–351. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp337-351>
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. 2020. Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Hanivan, H., & Nasrudin, N. 2019. A Financial Inclusion Index For Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 13(4), 353–470.
- Holle, M. H. 2020. Inklusi Keuangan; Solusi Pengentasan Kemiskinan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 01(02), 163–176.
- Iskandar, A. 2018. Inklusifitas Keuangan Syariah Dan Kemiskinan Di Indonesia. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 105–119.
- Isroviyah, N. 2020. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Penelitian*, 1–23.
- Kusuma, A. A. N. J., & Indrajaya, I. G. B. 2018. Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota provinsi bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 993–1022.
- Lestari, N. M. 2019. *Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E\_Commerce*. 10(November), 208–226.
- Lubis, D., & Ramadhoni, M. G. 2019. *Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah dengan Pembangunan di Negara Anggota OKI*. 7(2), 1–16.

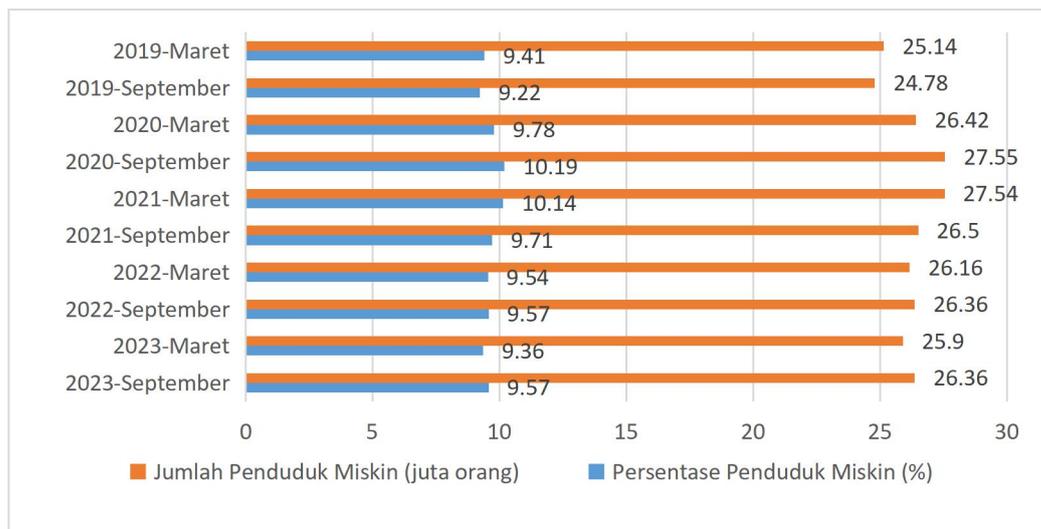
- <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.1-16>
- Maskur, S. R. R. 2023. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Maulidina, A., Nawawi, M. K., & Devi, A. 2023. Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4). <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2294>
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. 2022. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3). <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p1-13>
- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. 2020. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Sorot*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.55-63>
- Nufus, S. H., & Yazid, M. 2023. *Analysis Of Islamic Financial Institutions On Poverty In Indonesia*. 14(2), 13–18.
- Prastowo. 2018. Analisis regional keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 51–57. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol4.iss1.art6>
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Issue september 2016).
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. 2020. Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Rosana, E. 2019. Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19–34. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4483>
- Saha, S. K., & Qin, J. 2023. Financial inclusion and poverty alleviation: an empirical examination. *Economic Change and Restructuring*, 56(1). <https://doi.org/10.1007/s10644-022-09428-x>
- Salam Dz, A. 2018. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Sari, M. P., Amaliah, I., Pembangunan, P. E., Ekonomi, F., & Bandung, U. I. 2019. *Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2019*. 84–92.
- Sarma, M. 2012. *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness Mandira Sarma July 2012*. 07.
- Seman, J. A., Jamil, N. nazlia, & Hashim, A. J. C. M. 2019. *Construction Of Islamic Finance-Based Index Of Financial Inclusion: An Exploratory Study In Malaysia* (Issue July).
- Setyowati, F. A., & Ediyono, S. 2020. The Influence of School Participation Rates and Poverty on the Human Development Index in Indonesia 2019. *1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities*, 584(Icorsh 2020), 1033–1038.
- Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Tallesang, M. 2022. Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi. *SSRN Electronic Journal*, 2003, 14117–14125. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4080484>
- Umar, A. I. 2017. Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi*

- Moneter Dan Perbankan*, 20(1), 99–126. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.726>
- Zainudin, L. O. 2022. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sulawesi*. 7, 206–216.
- Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. 2023. *Pengaruh Pendidikan , Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. 5(September), 33–42.
- Zia, I. Z., & Prasetyo, P. E. 2018. Analysis of Financial Inclusion Toward Poverty and Income Inequality. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(1), 114. <https://doi.org/10.23917/jep.v19i1.5879>.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka konseptual



Grafik 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Indonesia Data Per Semester Tahun (2019-2023)

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 1. Devinisi Operasional Variabel

Variabel	Indicator Variabel	Devinisi	Sumber
Variabel Dependen Inklusi Keuangan Syariah (X1) (Umar, 2017)	Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS)	Mengukur nilai dimensi penetrasi perbankan syariah, dimensi ketersediaan perbankan syariah dan dimensi penggunaan perbankan syariah menjadi Indeks Inklusi Keuangan Syariah dari data laporan BUS, UUS maupun BPRS Tahun (2019-2023)	OJK dan Perhitungan Penulis
Variabel Dependen Pendidikan (X2) (Zaqiah et al., 2023)	Rata-rata lama Sekolah	Menukur rata-rata lama sekolah di 33 provinsi di Indonesia (2019-2023)	BPS
Variabel Dependen Ketimpangan Pendapatan (X3) (Maskur, 2023)	Gini Rasio	Menukur ketimpangan pendapatan pedesaan maupun perkotaan di 33 provinsi di Indonesia (2019-2023)	BPS
Variabel Independen Tingkat Kemiskinan (Y)	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Persentase Tingkat Kemiskinan pertahun	BPS

Tabel 2. Data Perhitungan Indeks Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Dimensi (di)	Bobot (Wi)	Batas		Batas Atas (Mi)				
		Bawah (mi)	2019	2020	2021	2022	2023	
Penetrasi Perbankan (d1)	1	0	23,43	24,24	28,85	32,51	21,52	
Ketersediaan Jasa Perbankan (d2)	1	0	5,22	8,89	9,79	8,68	8,73	
Penggunaan (d3)	1	0	127,46	221,85	233,79	246,70	254,66	

Tabel 3. Hasil perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Syariah disetiap Provinsi tahun (2019-2023)

NO	PROVINSI	IIKS 2019	IIKS 2020	IIKS 2021	IIKS 2022	IIKS 2023	Average IIKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,71	0,75	0,73	0,72	0,78	0,74
2	DKI Jakarta	0,75	0,58	0,55	0,56	0,52	0,59
3	NTB	0,42	0,30	0,30	0,31	0,33	0,33
4	Kepulauan Riau	0,23	0,16	0,13	0,29	0,35	0,23
5	DI Yogyakarta	0,30	0,21	0,18	0,18	0,18	0,21
6	Kalimantan Timur	0,27	0,18	0,16	0,16	0,13	0,18
7	Riau	0,14	0,10	0,10	0,22	0,25	0,16
8	Kalimantan Selatan	0,24	0,15	0,14	0,15	0,13	0,16
9	Bengkulu	0,19	0,12	0,12	0,19	0,13	0,15
10	Sumatera Barat	0,20	0,12	0,13	0,14	0,12	0,14
11	Kalimantan Barat	0,18	0,11	0,11	0,13	0,11	0,13
12	Banten	0,17	0,14	0,11	0,11	0,11	0,13
13	Jawa Barat	0,16	0,11	0,10	0,10	0,09	0,11
14	Maluku Utara	0,16	0,10	0,10	0,10	0,09	0,11
15	Sumatera Utara	0,16	0,10	0,09	0,10	0,08	0,11
16	Jambi	0,15	0,11	0,09	0,09	0,08	0,10
17	Sumatera Selatan	0,15	0,10	0,10	0,07	0,09	0,10
18	Sulawesi Selatan	0,15	0,09	0,09	0,09	0,08	0,10
19	Bangka Belitung	0,13	0,09	0,08	0,08	0,11	0,10
20	Jawa Timur	0,13	0,08	0,07	0,08	0,06	0,08
21	Jawa Tengah	0,13	0,08	0,07	0,07	0,06	0,08

22	Sulawesi Tenggara	0,12	0,07	0,07	0,06	0,06	0,08
23	Lampung	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
24	Sulawesi Tengah	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
25	Sulawesi Barat	0,08	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06
26	Kalimantan Tengah	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
27	Gorontalo	0,08	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
28	Bali	0,08	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
29	Sulawesi Utara	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
30	Papua Barat	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
31	Maluku	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
32	Papua	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
33	NTT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Perhitungan Penulis

Tabel 4. Hasil perhitungan rata-rata nilai indeks dimensi keuangan syariah disetiap provinsi tahun (2019-2023)

NO	PROVINSI	IKS	Average d1	Average d2	Average d3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,74	0,36	1,00	1,00
2	DKI Jakarta	0,59	1,00	0,41	0,41
3	NTB	0,33	0,11	0,25	0,59
4	Kepulauan Riau	0,23	0,13	0,38	0,15
5	DI Yogyakarta	0,21	0,10	0,29	0,23
6	Kalimantan Timur	0,18	0,11	0,33	0,06
7	Riau	0,16	0,11	0,24	0,12
8	Kalimantan Selatan	0,16	0,08	0,20	0,18
9	Bengkulu	0,15	0,04	0,20	0,19
10	Sumatera Barat	0,14	0,06	0,20	0,15
11	Kalimantan Barat	0,13	0,04	0,11	0,21
12	Banten	0,13	0,08	0,16	0,14
13	Jawa Barat	0,11	0,06	0,12	0,15
14	Maluku Utara	0,11	0,04	0,17	0,11
15	Sumatera Utara	0,11	0,06	0,13	0,12
16	Jambi	0,10	0,04	0,15	0,12
17	Sumatera Selatan	0,10	0,05	0,13	0,11
18	Sulawesi Selatan	0,10	0,04	0,13	0,11
19	Bangka Belitung	0,10	0,05	0,13	0,10
20	Jawa Timur	0,08	0,05	0,11	0,09
21	Jawa Tengah	0,08	0,04	0,09	0,11
22	Sulawesi Tenggara	0,08	0,03	0,11	0,08
23	Lampung	0,07	0,02	0,10	0,09
24	Sulawesi Tengah	0,07	0,03	0,11	0,06
25	Sulawesi Barat	0,06	0,01	0,08	0,08
26	Kalimantan Tengah	0,06	0,02	0,07	0,07
27	Gorontalo	0,06	0,01	0,08	0,07
28	Bali	0,05	0,02	0,07	0,07
29	Sulawesi Utara	0,04	0,01	0,05	0,05
30	Papua Barat	0,04	0,02	0,07	0,01
31	Maluku	0,03	0,02	0,04	0,04
32	Papua	0,02	0,01	0,03	0,02
33	NTT	0,01	0,00	0,01	0,02

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	IKS	Ketimpangan	Pendidikan	Kemiskinan
Mean	0,140676	0,349	9,14	10,51
Maximum	0,779029	0,449	11,42	27,53

Minimum	0,009104	0,236	6,85	3,47
Std. Deviation	0,153127	0,041	0,84	5,38
Count	165	165	165	165

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat statistik. Diolah.

Tabel 6. Estimasi Model

Variabel	Common Effect Model		Fixed Effect Model		Random Effect Model	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
	(Std.error)	(t-Statistic)	(Std.error)	(t-Statistic)	(Std.error)	(t-Statistic)
C	19.13756	0.0007	14.80440	0.0000	15.31558	0.0000
	(5.531257)	(3.459894)	(3.302382)	(4.482945)	(3.284259)	(4.663328)
Inklusi Keuangan Syariah	-0.891793	0.7413	-2.414534	0.0210	-2.534819	0.0126
	(2.697099)	(-0.330649)	(1.033614)	(-2.336011)	(1.004329)	(-2.523892)
Pendidikan	-2.213973	0.0000	-0.876334	0.0020	-0.944028	0.0005
	(0.492446)	(-4.495869)	(0.278437)	(-3.147338)	(0.266561)	(-3.541510)
Ketimpangan Pendapatan	33.57915	0.0005	11.59513	0.0041	11.95198	0.0025
	(9.427991)	(3.561644)	(0.278437)	(2.925145)	(3.887566)	(3.074412)
F-Statistic	12.66259		865.7773		10.88622	
Prob (F-Statistic)	0.000000		0.000000		0.000002	
R-Squared	0.190905		0.995761		0.168640	
Adj R-Squared	0.175829		0.994611		0.152149	

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Tabel 7. Hasil Uji Chow

Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	765.397974	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	866.509458	32	0.0000

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.428208	3	0.4884

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Tabel 9. Hasil Uji LM

Uji Lagrange Multiplier			
Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	322.7637	2.081326	324.8451
	(0.0000)	(0.1491)	(0.0000)

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Tabel 10. Uji Hipotesis

Uji F		Koefisien determinasi R <sup>2</sup>	
F-Statistic	3695694	R-Squared	0.466587
Prob (F-Statistic)	0.0000000	Adj R-Squared	0.453962

Sumber : Hasil olah data Eviews 12